



**PERANAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN NEGARA**

TESIS

**SUCIPTO
1320922095**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**



**PERANAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN NEGARA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

SUCIPTO

1320922095

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Sucipto
NRP : 1320922095
Tanggal : 16 Desember 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Desember 2015

Yang Menyatakan,


Sucipto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sucipto
NRP : 1320922095
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Pengadilan Pajak Dalam Peningkatan Pendapatan Negara

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Desember 2015
Yang menyatakan,



Sucipto

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Sucipto
NRP : 1320922095
Program : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Peranan Pengadilan Pajak Dalam Peningkatan Pendapatan Negara
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Erna Widjajati, SH, MH

Ketua Penguji



Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, MHum

Penguji Ahli



Prof. Dr. Jeane Neltje S, SH., MH., APU.

Pembimbing I



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.

Pembimbing II



Dr. Iwan Kresna Setiadi, S.E., M.M

Direktur



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.

Ketua Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Desember 2015

PERANAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA

Sucipto

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk kedudukan pengadilan pajak pada sistem peradilan di Indonesia dalam tujuannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa pajak dan peranan pengadilan pajak sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam pembangunan bangsa melalui peningkatan pendapatan negara sektor pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan dengan pemungutan pajak dalam hubungan dengan kewenangan negara seperti Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Kewajiban Pajak Mutlak, Teori Gaya Beli, Teori Gaya Pikul. Namun oleh peneliti teori yang paling pantas dipergunakan berkenaan dengan masalah penelitian ini adalah teori asuransi, dimana negara dalam menjalankan tugasnya, fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perorangan. Oleh karena itu negara bekerja atau bertindak sebagai perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga negara membayar premi, dan pembayaran pajak dapat dipandang sebagai premi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normative atau sering disebut penelitian hukum doctrinal.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Kedudukan pengadilan pajak dalam struktur kekuasaan kehakiman belum sejalan dengan semangat “satu atap” (one roof system) yang dianut sistem peradilan Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung, karena organisasi, administrasi dan keuangan masih berada dalam pengaruh eksekutif (Departemen Keuangan), dan dalam prakteknya kedudukan ini menyulitkan pengadilan pajak untuk mandiri sebagai suatu badan peradilan independen yang harus berfungsi melindungi kepentingan hukum wajib pajak secara adil terhadap penguasa (fiscus). Tugas dan fungsi peradilan pajak adalah memeriksa dan mengadili atau memutuskan sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya. Putusan adil dimaksud untuk menentukan kebenaran materiil yang sesuai dengan asas yang dianut peraturan perpajakan.

Saran yang disampaikan adalah struktur kedudukan pengadilan pajak perlu direformasi sesuai dengan semangat “satu atap” dengan menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan kepada Mahkamah Agung, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak khususnya Pasal 5 ayat (2) dan umumnya peraturan perundang-undangan perpajakan terkait perlu direvisi segera, diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Kata Kunci : pajak

ROLE IN INCREASING INCOME TAX COURT OF THE STATE

Sucipto

Abstract

This research was conducted for the position of the tax court on the Indonesian judicial system in its purpose as a tax dispute resolution institutions and the role of the tax court as an institution that provides legal protection to the taxpayer in the nation's development through increasing the state income tax sector.

The theory used in this research is the theory with regard to tax collection in relation to the authority of the state such as Insurance Theory, Theory of Interest, Tax Liabilities Absolute Theory, Theory of Style Buy, Theory of Style Pikul. But by researchers as the most likely theory is used with respect to this research problem is the insurance theory, which states in their duties, functions, duties also include the protection of life and property of individuals. Therefore, the state work or act as an insurer. For the protection of the citizens to pay premiums, and tax payments can be viewed as a premium. The method used is a normative juridical research or often called doctrinal legal research.

The results of this study defined that Notch tax court within the structure of the judicial power is not in line with the spirit of "one-stop" (one roof system) adopted by the Indonesian judicial system culminating in the Supreme Court, for the organization, administration and finance are still under the influence of the executive (Ministry of Finance), and in practice this position makes it difficult for independent tax court as an independent judicial body that should serve to protect the legal interests of taxpayers are fair to the ruler (fiscus). Duties and functions of tax justice is to investigate and adjudicate or decide disputes submitted to it. The verdict is fair meant to determine the veracity of the material in accordance with the principles adopted tax regulations. Suggestions submitted is the structure of the seat of the court taxes need to be reformed in accordance with the spirit of "one-stop" by giving coaching organization, administration and finance to the Supreme Court, therefore, Law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court in particular Article 5 (2) and general legislation related taxation needs to be revised soon, harmonized with Act No. 14 of 1985 as amended by Act No. 4 of 2004 on Judicial Power, and Law No. 5 of 2004 on the Supreme Court.

Keywords: taxes

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Tuhan Yang Maha Esa, karena anugrahNya tesis ini “Peranan Pengadilan Pajak Dalam Peningkatan Pendapatan Negara” ini dapat diselesaikan. Diharapkan kajian akademik yang sederhana ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan.

Tesis ini dapat diselesaikan karena dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,

Kepada :

1. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH.,MH selaku Pembimbing I
4. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N selaku Pembimbing II
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.
7. Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan perhatian yang lebih selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Sebagai akhir kata, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu dan mendorong penyelesaian tesis ini. Semoga semua kebaikan dan ketulusan para pihak akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan penulis mengharapkan saran dan tindak lanjutnya dalam melengkapi dan merealisasikan kajian akademik yang sederhana ini.

Jakarta, 16 Desember 2015

Penulis



Sucipto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	9
I.3 Tujuan Penelitian.....	9
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
I.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II SISTEM PERPAJAKAN DAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA	18
II.1 Perpajakan di Indonesia.....	18
II.1.1 Sistem Perpajakan.....	18
II.1.2 Legitimasi Negara Untuk Memungut Pajak.....	22
II.1.3 Prinsip-Prinsip Dalam Sistem Pemungutan Pajak.....	27
II.1.4 Prinsip Self Assesment dan Keadilan Pajak.....	34
II.2 Pengadilan Pajak.....	41
II.2.1 Sejarah Lahirnya Pengadilan Pajak.....	41
II.2.2 Fungsi dan Tujuan Keadilan Lembaga Pengadilan Pajak.....	43
II.2.3 Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak.....	52
II.2.4 Pengadilan Pajak Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	69
III.1 Pendekatan Penelitian.....	69
III.2 Spesifikasi Penelitian.....	69
III.3 Data Penelitian.....	69
III.4 Analisa Data.....	70
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA-SENGKETA PADA PENGADILAN PAJAK	71
IV.1 Kronologis Perkara Dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-53046/PP/M.IIIA/99/2014.....	71
IV.2 Analisa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-53046/PP/M.IIIA/99/2014 Yang Mengalahkan Direktorat Jenderal Pajak Dilihat dari Kepentingan Negara.....	78
IV.3 Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak.....	99

BAB V PENUTUP.....	105
V.1 Kesimpulan.....	105
V.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
RIWAYAT HIDUP	